

KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM UPAYA MEMPERBAIKI HUBUNGAN BILATERAL JEPANG – KOREA SELATAN PASCA DISTORSI SEJARAH

Oleh:

M. Fauzi A.,

Pujanter13@gmail.com

Pembimbing: Drs. Syafri Harto, M.Si

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/fax.
0761-63277**

Abstract

This research aims to determine about interests of the United States in an effort to improve bilateral relations of Japan and South Korea post distortion of history. Type of this research is descriptive analysis. Japan and South Korea are the two countries that have egos to be able to carry out bilateral cooperation, this is due to historical factors. Japan is a country that ever invaded South Korea and caused reluctance to cooperate with Japanese. United States as an ally of both countries try to take a role in the problem occurred, the author tries to explain detail about what the American interest in improving relations between the two countries. Sources to be presented in this research is secondary sources.

Sources were obtained through literature review, other books, internet, etc. The sources analysis is qualitative analysis. This research uses a level analysis of nation-state, use perspective that describes of national interest. The national interest is a purpose, expectations, and goals to be achieved by country.

The conclusions of this research the interest that is To maintain stability and security in the region to maintain position as the country's sole hegemony in the world., as well as reducing the influence of North Korea and China especially as countries have different ideologies. This is because Japan and South Korea is an American stronghold in the East Asia region.

Key word : National Interest, nation – state, distortion of history

Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan membahas kepentingan Amerika Serikat dalam upaya memperbaiki hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan pasca distorsi sejarah yang

dilakukan oleh Jepang. Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan merupakan 3 negara yang memiliki latar belakang sejarah yang saling bertautan, Jepang merupakan negara yang kalah dalam perang dunia ke II melawan Amerika Serikat dan sekutunya,

Amerika Serikat merupakan negara yang sangat berpengaruh dalam pecahnya Korea menjadi dua negara (Korea Utara dan Korea Selatan) dan pembentukan negara Korea Selatan, sementara Korea Selatan sendiri merupakan salah satu negara bekas jajahan Jepang. Terlepas dari latar belakang sejarah yang tidak terlalu baik Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan memiliki interaksi dalam kerjasama yang dapat dikatakan intens. Bahkan Jepang sebagai negara yang telah dibuat babak belur oleh Amerika Serikat pada peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki tetap menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat.

Begitu juga dengan hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan yang secara perlahan membaik meski keduanya masih memiliki permasalahan mengenai distorsi sejarah yang sampai sekarang belum diselesaikan, diantaranya distorsi sejarah yang dilakukan oleh Jepang yaitu mengenai imperialisme Jepang yang didalamnya sarat akan kekejaman namun diubah seakan menjadi sesuatu yang indah (memungkirkan holocaust yang dibuatnya kala itu), permasalahan jughun ianfu (wanita dari wilayah jajahan Jepang yang dijadikan pemuas seks tentara Jepang) dan yang paling kerap naik ke permukaan adalah mengenai perebutan kepemilikan atas pulau Dokdo (bagi Korea Selatan) dan Takeshima (bagi Jepang)¹, pada kajian ini penulis lebih menitik beratkan pada kasus kepemilikan atas pulau Dokdo dikarenakan memang kerap menjadi pemicu perselisihan diantara dua negara tetangga ini kembali mencuat. Gugusan pulau karang yang oleh Korea Selatan disebut sebagai pulau Dokdo, dan oleh Jepang disebut sebagai pulau Takeshima terletak kurang lebih di tengah-tengah antara Jepang dan Korsel, sekitar 220

kilometer dari Samchok, kota pelabuhan di pesisir timur Korsel dan berjarak kurang lebih sama dari Matsue, kota pelabuhan di pantai barat Jepang. Sengketa ini kembali mencuat setelah Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan menyatakan dengan tegas bahwa secara historis maupun yuridis, Pulau Dokdo adalah bagian dari wilayah kedaulatan Jepang. Pernyataan ini memancing kemarahan rakyat Korea Selatan yang merasa bahwa pulau tersebut adalah wilayah teritorial mereka. Pulau karang yang terletak di arah timur pulau Ullung Korea Selatan dan di bagian tenggara pulau Oki Jepang menjadi sengketa dan pengklaiman atas kepemilikan yang diperebutkan oleh Jepang dan Korea Selatan. Masing-masing negara mengklaim pulau tersebut berdasarkan letak geografi, histori, dan hukum internasional.²

Persengketaan pulau Takeshima/Dokdo ini kembali memanas pada tahun 2005 yaitu saat Jepang mengesahkan suatu peraturan yang menyatakan bahwa pulau Takeshima/Dokdo merupakan bagian dari prefektur Shimane oleh Dewan Prefektur Shimane dan diperkuat oleh pemerintah Jepang dengan mempublikasikan sebagai "Takeshima Day" atau Hari Takeshima dan hal ini menyulut kemarahan rakyat Korea Selatan. Pada tanggal 24 April tahun 2006, Jepang berencana untuk melakukan survei maritim di sekitar kepulauan Liancourt (Pulau Takeshima/Dokdo). Korea Selatan mengancam akan menangkap penjaga pantai Jepang jika Jepang terus berusaha untuk melakukan survei maritim dan Korea Selatan juga akan mengirim 20 kapal meriam jika survei tersebut tetap diberlakukan. Berselang sehari, pada tanggal 25 April 2006, Presiden Korea Selatan saat itu, Roh Moo-hyun, meminta Jepang untuk

¹Barber J. Steven, Dokdo – Takeshima Island : *A Brief Introduction to Korea's Dokdo [Takeshima] Island*. 2009, Hal. 36

²Lee, Ran Key, 1998, "Korea's Territorial Rights to Tokdo History and International Law." *Korea Observer* XXIX-1

minta maaf atas kolonialisasi yang dilakukan Jepang sebelumnya atas pulau – pulau dan Korea Selatan secara keseluruhan.³

Korea Selatan justru mendeklarasikan atas penggunaan “quiet diplomacy” untuk menghadapi provokasi Jepang dengan diplomasi dan menghasilkan perundingan dalam negosiasi di akhir bulan April dan pertengahan bulan Juni 2006 saat kebijakan luar negeri Jepang yang semakin tegas terhadap kepulauan Takeshima/Dokdo.⁴ Pada bulan Juli 2006, Pemerintahan Korea Selatan mengirim kapal penelitian untuk mengumpulkan data di sekitar Pulau Takeshima/Dokdo. Hal ini menuai protes oleh rakyat Jepang yang melakukan protes di depan kedutaan Korea Selatan dan meminta Korea Selatan lebih mempertimbangkan lagi atas pengiriman marinir untuk menggantikan kepolisian di pulau yang menjadi sengketa tersebut.

Di tahun 2008, Jepang mempertegas klaimnya dengan cara memasukkan kepulauan Dokdo ke dalam buku kurikulum pendidikan sekolah menengah Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa Jepang melakukan pengenalan untuk anak sekolah menengah atas legalitas Jepang terhadap Pulau Takeshima dan negara lain termasuk Korea Selatan tidak berhak atas pulau Takeshima dan hal ini menuai protes dari Korea Selatan. Jepang dan Korea Selatan yang begitu sensitif terhadap sengketa Pulau Dokdo ini. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo, akan tetapi hingga kini belum tercapai suatu penyelesaian terhadap sengketa tersebut.

³Nitin Philip, *The General Assembly : Dokdo/ Takeshima Islands Dispute (Japan – S. Korea)*, 2013, hal 5

⁴David Kang & Ji-Young Lee, *Japan-Korea Relations: More Squabbling*, Little Progress. E-Journal, 2010, Hal.3

Belum tercapainya kesepakatan mengenai batas wilayah antara Jepang dan Korea Selatan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kedaulatan di wilayah tersebut. Permasalahan ini kembali naik ke permukaan tepat pada tahun 2013. Ketika Jepang memuat kembali dalam buku pelajaran menengah dan atas tentang status Takeshima sebagai wilayah yang tidak dapat dilepaskan dari Jepang.

Melihat gejolak hubungan bilateral dua negara ini Amerika Serikat selaku negara yang memiliki hubungan kerjasama trilateral dengan dua negara yang sedang berseteru tidak tinggal diam. Tindakan terbaru Melalui Marie Harf, Wakil jebir Kementerian Luar Negeri AS pada hari Rabu 19 februari 2014 mengungkapkan, Washington berharap Seoul dan Tokyo bekerjasama untuk menyelesaikan perseteruan mereka melalui perundingan. Tentunya dari perseteruan yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan dapat menghambat tercapainya tujuan kerjasama trilateral ketiga negara, terkhusus kepentingan Amerika Serikat sendiri.⁵

Kerjasama trilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh tiga pihak (negara) untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama trilateral Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang memiliki sejarah panjang dalam urusan kerjasama maritim tertanda awal saat terjadinya perang Korea. Bahkan sebelum kerjasama trilateral ini terjalin kerjasama bilateral antar tiga negara ini sudah lebih dulu ada, seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan yang telah berhubungan bahkan sebelum Korea Selatan berdiri sebagai negara. Kerjasama trilateral antara Amerika Serikat, Jepang dan Korea bergerak dibidang keamanan. Kerjasama ini terbentuk dari adanya ancaman yang datang

⁵http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=14727&type=105#.UzZXTpumnFw diakses pada tgl. 2 Februari 2014

dari Negara tetangga Jepang dan Korea Selatan yaitu Korea Utara. Kerjasama dibidang militer dan keamanan ini merupakan tindak lanjut dari ketegangan dikawasan Asia Timur yang disebabkan oleh ulah Korea Utara yang secara terang-terangan mengembangkan nuklir untuk persenjataan dan peningkatan kapabilitas militer china sepihak.

Jelas hal ini menjadi sebuah ancaman serius bagi Amerika Serikat terlebih China dan Korea Utara memiliki perbedaan ideologi dengan Amerika Serikat. Containment Policy masih sangat dipegang kuat amerika dalam arah kebijakan luar negrinya, *Containment policy* menjadi justifikasi bagi AS untuk melancarkan geostrateginya ke wilayah Asia Timur sebagai upaya membendung penyebaran pengaruh komunisme Soviet. Cina dan Korea Utara merupakan negara dengan ideologi komunis sangat kental. Dengan ideologi non demokratisnya, akan dipastikan Cina dan Korea Utara memiliki sifat ekspansif layaknya Soviet.⁶

Jelas hal ini menjadi ketakutan bagi Korea Selatan dan Jepang mengingat kedua negara ini memiliki permasalahan yang cukup serius dengan china dalam hal sengketa wilayah diantaranya sengketa Pulau sinkaku dan sengketa Laut china selatan. Bahkan dalam dokumen *National Defense White Paper* 2008, pemerintah Cina secara eksplisit menyatakan adanya keinginan China untuk mengupayakan perluasan kapasitas dan kekuasaannya hingga kawasan Pasifik dan sekitarnya.⁷ Peningkatan kapabilitas militer Korea Utara dan Cina tidak hanya menimbulkan security dilema bagi Jepang

dan Korea selatan saja tapi Amerika Serikat sebagai Negara yang memiliki kekuatan hegemoni tunggal didunia tentu hal itu akan mengancam posisi hegemoni Amerika Serikat dikawasan Asia Timur.

Pembahasan

1. Konflik Jepang dan Korea Selatan

Jepang dan Korea Selatan memiliki Sengketa yang berkepanjangan dalam memperebutkan kepulauan dokdo dan masalah sejarah dimasa lal. Hal itu disebabkan juga oleh kurang baiknya hubungan bilateral antar kedua negara tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Lipi bahwa penyelesaian ditingkat bilateral dapat membantu proses penyelesaian sengketa teritorial dan bersama-sama membantu proses penyelesaian secara global.⁸ Sebelum masuk lebih jauh mengenai potensi konflik Jepang dan Korea Selatan penulis terlebih dulu menyajikan sejarah singkat kedua negara.

1.1. Kerikil tajam bagi jepang akibat sejarah

Untuk kelima kalinya , Perdana Menteri Junichiro Koizumi berkunjung ke Kuil Yasukuni. Seperti yang sudah-sudah, kunjungan itu menuai kemarahan China dan Korea Selatan. Hubungan diplomatik Jepang dan kedua negara itu berada di ujung tanduk. Kuil Yakusuni yang berarti “negeri yang damai” itu memang menyimpan luka lama. Di kuil yang dibangun tahun 1869 itu dimakamkan sekitar 2,5 juta orang Jepang yang tewas selama perang. Meraka terdiri atas perawat, prajurit, dan pelajar yang maju ke medan perang. Bagi sebagian besar orang Jepang, mereka dikuburkan di kuil itu adalah pahlawan sehingga patut didoakan dan dihormati.

⁶Djafar, Zainuddin,. *Indonesia, ASEAN & Dinamika Asia Timur*. Jakarta: Pustaka Jaya.2009.hal. 137

⁷Khairunnisa, “kebijakan militer amerika serikat di kawasan asia pasifik 2009-2012” *ejournal*.hi.fisip-unmul.org, hal.594

⁸ LIPI, Komunika, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal. 59

Namun, bagi rakyat China dan Korea Selatan, Kuil Yasukuni dipandang tak lebih sebagai simbol kekejaman Jepang. Palsunya, di kuil itu dimakamkan juga penjahat kelas A, seperti Perdana Menteri Jendral Hideki Tojo yang bertanggung jawab atas kekejaman Jepang selama perang dunia II. Karena itu, kunjungan para pejabat Jepang, termasuk Koizumi seakan membangkitkan luka lama dan kenangan pahit Bangsa Korea Selatan. hal itu seakan menggambarkan kembali bagaimana kebengisan masa kolonialisme Jepang di Korea, terlebih mengingatkan Korea Selatan akan peristiwa pergerakan 1 maret 1919 dimana sekitar 2 juta Masyarakat Korea terlibat didalamnya. Belum lagi ratusan ribu perempuan Korea dinistakan sebagai budak seks tentara Jepang sejak tahun 1932. Sebagian dari mereka dibunuh. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia dan beberapa negara lain di Asia Tenggara. Luka lama itulah yang menyebabkan setiap kunjungan Koizumi di Kuil Yasukuni ditanggapi secara sangat keras oleh Korea dan China. Mereka menganggap kunjungan tersebut sebagai simbol tidak adanya penyesalan Pemerintah Jepang atas kekejaman militernya di masa lalu.

Apa yang dilakukan Jepang memang berbeda dengan Jerman yang mengakui kekejaman Adolf Hitler dan memaparkan tragedi Holocaust secara detail disekolah-sekolah agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Pemerintah Jerman juga meminta maaf sehingga proses rekonsiliasi dengan bekas musuhnya berjalan mulus. Saat ini Jerman sudah bisa bersekutu dengan musuh-musuh lamanya. Pemerintah Jepang dianggap tidak memiliki pendekatan politik yang nyata untuk rekonsiliasi. Pemerintah dan kalangan bisnis hanya melakukan pendekatan dengan menginvestasikan uang dalam jumlah besar di negara-negara Asia Timur. Dngan cara

itu, negara-negara Asia Timur akan bergantung dan tidak mengungkit masa lalu.

1.2. Sengketa Pulau Dokdo bagi Korea Selatan dan Takeshima bagi Jepang.

Sengketa kepemilikan atas sebuah gugusan pulau yang diberi nama Dokdo oleh Korea Selatan dan Takeshima oleh Jepang ini memang selalu menjadi isu hangat dan sensitif bagi kedua negara di Asia Timur itu. Maka dari itu dapat dikatakan Dokdo merupakan sumber konflik yang tidak akan pernah dingin bagi kedua belah pihak

Di tahun 2008, Jepang mempertegas klaimnya dengan cara memasukkan kepulauan Dokdo ke dalam buku kurikulum pendidikan sekolah menengah Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa Jepang melakukan pengenalan untuk anak sekolah menengah atas legalitas Jepang terhadap Pulau Takeshima dan negara lain termasuk Korea Selatan tidak berhak atas pulau Takeshima dan hal ini menuai protes dari Korea Selatan.⁹ Kemudian pada tahun 2012, Presiden Korea Selatan saat itu, Lee Myung Bak melakukan kunjungan ke pulau tersebut dan menunjukkan bahwa presiden pertama yang mengunjungi pulau tersebut. Pada tahun 2012, Jepang mengajukan masalah sengketa Pulau Takeshima/Dokdo ini ke Mahkamah Internasional, namun sekali lagi ditolak oleh Korea Selatan. Pemerintahan Korea Selatan menyatakan bahwa permasalahan Pulau Dokdo tidak akan diangkat menuju Mahkamah Internasional. Korea Selatan lebih memfokuskan pada pengumpulan dokumentasi yang menunjukkan bukti serta pengumpulan peta kepemilikan wilayah Korea Selatan yang dapat dijadikan acuan untuk membuktikan

⁹ Jeffrey Hays, *Tensions Over the Takeshima-Dokdo Islands*, 2013 dalam <http://factsanddetails.com/japan.php?itemid=2922&catid=22&subcatid=149#552> diakses hari Senin, 20 April 2014

bahwa Pulau Takeshima dan Pulau Dokdo merupakan wilayah Korea Selatan.

2.2.3. Permasalahan Jughun Ianfu

Masa penjajahan Jepang di Korea Selatan memang sudah berakhir namun tidak serta merta menghapus sejarah dan kepedihan akan sejarah yang pernah terjadi di Korea Selatan. Jughun Ianfu merupakan sebutan bagi wanita masa kolonial Jepang yang dijadikan penghibur (pemuas nafsu sex) tentara Jepang. "Ianfu" adalah istilah Jepang terhadap perempuan "penghibur" tentara kekaisaran Jepang dimasa perang Asia Pasifik, istilah asing lainnya adalah *comfort woman*. Pada kenyataannya "Ianfu" bukan merupakan perempuan penghibur tetapi perbudakan seksual yang brutal, terencana, serta dianggap masyarakat internasional sebagai kejahatan perang. Diperkirakan 200 sampai 400 ribu perempuan Asia berusia 13 hingga 25 tahun. Konggres internasional sepakat menggunakan istilah "Ianfu".¹⁰

Kaisar Hirohito merupakan pemberi restu sistem Jughun Ianfu ini diterapkan di seluruh Asia Pasifik. Para pelaksana di lapangan adalah para petinggi militer yang memberi komando perang. Maka saat ini pihak yang harus bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan ini adalah pemerintah Jepang. Namun yang menjadi permasalahan kini adalah keengganan Pemerintah Jepang masa kini untuk mengakui keterlibatannya dalam praktek perbudakan seksual di masa perang Asia Pasifik. Pemerintah Jepang berdalih Jughun Ianfu dikelola dan dioperasikan oleh pihak swasta. Pemerintah Jepang menolak meminta maaf secara resmi kepada para Jughun Ianfu. Kendatipun demikian Juli 1995 Perdana Menteri Tomiichi Murayama

pernah menyiratkan permintaan maaf secara pribadi, tetapi tidak mewakili negara Jepang. Tahun 1993 Yohei Kono mewakili sekretaris kabinet Jepang memberikan pernyataan empatinya kepada korban Jughun Ianfu. Namun pada Maret 2007 Perdana Menteri Shinzo Abe mengeluarkan pernyataan yang kontroversial dengan menyanggah keterlibatan militer Jepang dalam praktek sistem perbudakan seksual.

Jelas pernyataan itu langsung menghasilkan kecaman bertubi-tubi bagi pemerintah Jepang. Semua negara bekas jajahan Jepang mengajukan protes akan tindakan Abe yang dianggap telah mungkir dari fakta sejarah dan berupaya untuk mendistorsi sejarah kebangisan masa kolonial Jepang. Naiknya permasalahan Jughun Ianfu kembali kepermukaan setelah beberapa tahun menghilang dikarenakan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan di Korea Selatan di tahun 2011. Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan mei 2013 pun ikut mendesak pemerintah Jepang untuk tidak membangkitkan trauma wanita penghibur (*jughun ianfu*) yang dipaksa menjadi budak seks semasa Perang Dunia II. Permasalahan mengenai jughun ianfu ini menambah daftar pemicu konflik kedua negara. Amerika Serikat selaku sekutu merasa permasalahan jughun ianfu harus segera diselesaikan karena dapat mengganggu tercapainya kerjasama trilateral yang diharapkan oleh ketiga belah pihak untuk melawan Korea Utara dalam aksi nuklirnya. Hal itu tergambar jelas Ketika Korea Utara bersiap merilis rudal nuklirnya April 2013, petinggi militer AS dalam kunjungannya ke Jepang secara terbuka menyampaikan rasa frustrasinya atas ketidakmampuan militer Jepang dan Korea Selatan bekerja sama dalam menghadapi ancaman tersebut. Menurut Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Martin Dempsey mengatakan hal itu terjadi lantaran kedua negara bersitegang terkait masalah

¹⁰ " Ianfu Indonesia " diakses di <http://www.ianfuindonesia.webs.com/> pada tanggal 10 Juli 2014

“wanita penghibur”. Damsey juga mengingatkan kembali bahwa militer AS memiliki “gambaran operasi bersama yang sempurna” dengan dua sekutu utamanya di Asia. Maka diminta kerjasama yang kuat dari Jepang dan Korea Selatan.¹¹

3. Upaya Amerika Serikat memperbaiki hubungan Jepang dan Korea Selatan

Pembahasan pada bab ini akan menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat guna memperbaiki hubungan bilateral Jepang – Korea Selatan akibat distorsi sejarah yang terjadi. Secara lebih spesifik, penulis juga akan memaparkan mengenai kerja sama Trilateral Amerika Serikat bersama Jepang dan Korea Selatan dibidang militer.

3.1. Upaya melalui perwakilan Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan negara sekutu bagi Jepang dan Korea Selatan terlebih ketika Korea Utara muncul terang-terangan sebagai sebuah ancaman di kawasan Asia Timur. Sengketa antara Jepang dan Korea Selatan memang telah berjalan cukup lama, hal itu menyangkut atas kepemilikan sebuah gugusan pulau yang diberi nama Dokdo oleh Korea Selatan dan Takeshima oleh Jepang dan tidak hanya itu permasalahan jughun ianfu juga tak kalah sering naik kepermukaan sebagai pemicu kesenjangan hubungan Jepang dan Korea Selatan. Disini Amerika Serikat sebagai negara yang paling dominan dalam upaya memperbaiki kerusakan hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan. disetiap kesempatan dalam pertemuan petinggi tiga negara ini Amerika Serikat selalu

¹¹ “isu jugun ianfu hantui Jepang” diakses di <http://indo.wsj.com/posts/2013/06/05/isu-jugun-ianfu-hantui-jepang/> pada tanggal 10 juli 2014

menyatakan pentingnya hubungan baik antara Jepang dan Korea Selatan.

Kerisauan Amerika Serikat akibat kesenjangan hubungan bilateral tersebut bukan tanpa alasan. Hal itu dikarenakan hasil sebuah survei yang dilakukan Yomiuri Shimbun Jepang dan Hankook Ilbo Korea Selatan menunjukkan sentimen publik antara Korea Selatan dan Jepang telah memburuk akibat ketegangan politik atas isu-isu sejarah masa lalu yang tumbuh diantara kedua negara. Yomiuri Shimbun Jepang dan Hankook Ilbo Korea Selatan merupakan surat kabar nasional di kedua negara. Hasil survei yang dilakukan oleh kedua pihak dimasing-masing negara menunjukkan suatu yang cukup mengawatirkan tak hanya bagi Jepang dan Korea Selatan tapi juga bagi Amerika Serikat. Survei telepon ini dilakukan sejak 23-25 Mei 2014 dan menghasilkan persentase berupa 73% responden Jepang Mengatakan mereka tidak menganggap Korea Selatan tidak dapat dipercaya dan hasil ini mengalami penurunan sebesar 13% dari survei yang dilakukan oleh surat kabar Yomiuri Shimbun ditahun sebelumnya. Dan survei di tahun 2014 ini merupakan rekor terendah sejak survei pertama kali dilakukan pada tahun 1995.¹²

Hasil yang serupa juga didapatkan oleh Hankook Ilbo melalui survei di Korea Selatan sebanyak 83% warga Korea Selatan tidak menganggap Jepang dapat dipercaya, dan hasil ini juga mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya bahkan menempatkan survei ditahun 2014 ini sebagai nilai terendah sejak tahun 2007. Mayoritas kedua belah pihak mengatakan

¹²“ Survei: Hubungan Korsel dan Jepang Memburuk Akibat Ketegangan Politik” diakses di http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=15598&type=105#.U7rIS5SSz3Q pada tanggal 8 juli 2014

hubungan bilateral antara kedua negara buruk dengan 87 persen dari opini responden Jepang dan 86 persen dari Korsel Sementara 90 persen responden Korsel dan 83 persen responden Jepang setuju hubungan bilateral harus diperbaiki, 77 persen dari Korea Selatan dan 57 persen dari Jepang juga mengatakan hubungan ini juga tidak dapat ditingkatkan jika negara lain membuat pernyataan yang mereka anggap tidak dapat diterima.¹³ Pernyataan-pernyataan yang dimaksud ialah mengenai kepulauan dokdo dan realitas sejarah yang hingga saat ini masih distorsi. Hal itu diakibatkan kedua belah pihak mengungkapkan hal yang berbeda-beda mengenai fakta sejarah dan Jepang sebagai aktor utama sering melakukan pengaburan fakta sejarah.

Ditahun 2014 tercatat Amerika Serikat telah beberapa kali mengungkapkan melalui perwakilannya begitunya penting hubungan baik antara Jepang dan Korea Selatan. pada tanggal 4 Februari Amerika Serikat melalui Danie Russel, Asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Asia Timur dan Pasifik kembali mendesak Jepang dan Korea Selatan agar menyelesaikan ketegangan antara kedua negara. hal itu dikarenakan Amerika mulai Cemas akan provokasi tiada henti dari Korea Utara dan juga modernisasi militer China.¹⁴

3.2 Amerika Serikat sebagai Mediator

¹³ "Haru biru hubungan Korea Selatan-Jepang akibat peningkatan ketegangan politik" diakses di http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_in_detail.htm?No=32649 pada tanggal 8 Juli 2014.

¹⁴ AS Desak Korsel, Cina dan Jepang Selesaikan Ketegangan diakses di http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=14593&type=105#.U8KdxqPoWcY pada tanggal 28 Maret 2014

Permasalahan yang melibatkan dua negara sekutu Amerika Serikat ini menyebabkan dilema bagi Amerika Serikat. Bagaimana tidak, renggangnya hubungan Jepang dan Korea Selatan membuat tidak kondusifnya kerjasama keamanan yang dibangun oleh Amerika Serikat dikawasan Asia Timur. Dimana semestinya kedua negara sama-sama fokus untuk menghadapi nuklir Korea Utara, namun akibat renggangnya hubungan membuat kedua negara ini saling mencurigai. Amerika Serikat melakukan beberapa cara diantaranya mencoba menjadi penengah dan mediator dalam konflik Jepang dan Korea Selatan guna menghasilkan hubungan bilateral yang lebih baik bagi kedua negara. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh bila negara yang bersengketa mengalami kebutuhan dalam menyelesaikan permasalahannya. Salah satu cara yang sering digunakan adalah Mediasi.

Mediation is a political process in which conflicting parties (stakeholders) agree to accept one or more third actors who are not party to the conflict, who enjoy the trust of the disputants, and who are considered potentially supportive in overcoming the deadlock triggered by a stalemate in the conflict. It is important to differentiate between official mediation processes (based on a mediation mandate, agreed agendas, rules of engagement, etc.) and unofficial mediation processes, including track 2 activities such as dialogue facilitation and problem-solving, as well as local mediation by insider

*mediators. While official and unofficial mediation processes are in principle complementary, reality shows that the lines between them are often blurred.*¹⁵

Mediasi merupakan sebuah proses politik dimana pihak yang berkonflik (stakeholders) setuju untuk menerima satu atau lebih aktor yang tidak terlibat dalam konflik. Dan kedua negara yang berkonflik memberikan kepercayaan kepada aktor ketiga yang dianggap berpotensi mendukung dalam mengatasi kebuntuan yang dihadapi oleh dua negara dalam menghadapi konflik. Ada dua pembagian proses mediasi, yaitu media resmi dan media tidak resmi. Proses mediasi resmi ditandai dengan adanya mandat, agenda kesepakatan, proses perjanjian, dll, sementara proses yang tidak resmi termasuk didalamnya dua kegiatan seperti fasilitasi dialog dan pemecahan masalah serta mediasi oleh mediator. Pihak ketiga yang hanya bertindak sebagai pelaku mediasi atau mediator komunikasi bagi pihak ketiga untuk mencarikan negosiasi-negosiasi, maka peran dari pihak ketiga disebut sebagai *good office*. Seorang mediator merupakan pihak ketiga yang memiliki peran yang aktif untuk mencari solusi yang tepat untuk melancarkan terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai dan untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung di antara para pihak. Tujuannya adalah untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung di antara para pihak. Mediator bisa negara, individu, dan organisasi internasional.

Upaya yang terbaru dilakukan oleh Amerika Serikat untuk dapat menjadi Mediator adalah saat dimana Jepang dan Korea Selatan bertemu di Seoul. Pertemuan setara wakil menteri luar negeri ini merupakan hasil dari pernyataan sebelumnya oleh danie russel, bahwa Jepang dan Korea Selatan harus segera memperbaiki hubungan bilateralnya karena akan berdampak bukan hanya bagi Amerika tapi bagi stabilitas keamanan di Asia Timur. Pada pertemuan yang berlangsung pada tanggal 13 Maret 2014 itu membuahkan sebuah komitmen kuat kedua negara untuk memperbaiki hubungan bilateralnya dan mengharapkan Barrack Obama selaku presiden Amerika Serikat dapat menjadi mediator dalam pertemuan yang akan digelar di Den Haag, Belanda pada 24-25 Maret 2014. Shinzo Abe mengharapkan dalam pertemuan KTT Keamanan Nuklir tersebut obama dapat mengajak Presiden Korea Selatan Park Geun-hye untuk melakukan pertemuan secara empat mata. Permintaan Abe terhadap obama dilakukan karena belum berhasilnya Abe melakukan pertemuan dengan Park yang disebabkan oleh keengganan Park mengingat Jepang yang terlihat tidak serius dalam pernyataan maaf atas kekejamannya dimasa lalu.¹⁶

Dan permintaan tersebut disambut baik oleh presiden Amerika Serikat Barack Obama, tepat ditanggal 25 setelah berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi keamanan nuklir di Den Haag, Obama dapat mempertemukan untuk pertama kalinya pemimpin kedua negara yaitu perdana menteri Jepang Shnzo Abe dan presiden Korea Selatan Park Geun-hye setelah menjabat sebagai pemmpin negara selama setahun lebih. Dalam pertemuan itu Park

¹⁵ McCartney, Dilemmas of Third-Party Involvement in Peace Processes. Reflections for Practice and Policy from Colombia and the Philippines, London, Conciliation Resources. 2006. Hal. 4

¹⁶ Sita Planasari Aquadini, " AS mendesak Seoul dan Tokyo mencari cara untuk mengubur luka dimasa lalu", Koran Kompas, 13 Maret 2014, hal. 30

menekankan bahwa kesatuan respon masyarakat internasional, termasuk Korea Selatan, AS dan Jepang, sangat penting saat masalah nuklir Korea Utara muncul menjadi ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan di Asia Timur Laut. Park mengatakan fakta bahwa para pemimpin tiga negara telah duduk bersama membahas masalah nuklir Pyongyang adalah hal yang signifikan. Dia kemudian menyatakan harapannya bahwa KTT ini akan menyediakan kesempatan bagi tiga negara menegaskan kembali kerja sama dalam penanganan masalah nuklir Korut. Obama menekankan bahwa Seoul, Washington dan Tokyo harus meningkatkan aliansi mereka bagi perdamaian dan keamanan di regional tersebut. Abe mengatakan KTT pada hari Selasa ini sangat berarti pada hal para pemimpin tiga negara mengadakan pembicaraan ekstensif terkait keamanan. Ketiga pemimpin juga memberikan penilaian soal situasi ambisi nuklir Korut dan membahas cara-cara untuk meningkatkan kerjasama denuklirisasi Semenanjung Korea.¹⁷

III.3 Menjalinkan kerjasama trilateral

Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat memiliki hubungan kerjasama Trilateral dibidang kelautan (*naval*) yang bermula sejak tahun 1998.¹⁸ Hubungan kerjasama yang terjalin dikarenakan ketiga

¹⁷ Korea Selatan, AS, dan Jepang, adakan KTT trilateral diakses di <file:///D:/proposal/1%20bahan%20skripsi%20kepentingan%20AS,%20thdp%20Jepang-korsel/PERTEMUAN%20PERTAMA%20Politik%20Warta%20Berita%20Warta%20Berita%20KBS%20World%20Radio.htm> pada tanggal 10 Juli 2014

¹⁸ "Trilateral Naval Cooperation: Korea-US-Japan Workshop III," jointly sponsored by The Korea Institute for Defense Analyses, The Center for Naval Analyses, and The Okazaki Institute, 1999, p. 2-3.

negara ini memiliki sebuah ketakutan atas pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Pada tanggal 26 dan 27 oktober 2002 diadakan sebuah konferensi tingkat tinggi antara Amerika Serikat, Jepang dan Korea selatan di Loskabos, Meksiko yang mana KTT ini dihadiri oleh petinggi tiga negara presiden Amerika Serikat George W. Bush, presiden Korea Selatan Kim Dae-Jung, dan perdana menteri Jepang Junichiro Koizumi, pertemuan ini diadakan untuk membahas mengenai komitmen ketiga negara dalam menciptakan semenanjung Korea yang damai dan bebas dari senjata nuklir. KTT ini membahas mengenai konsistensi ketiga negara dalam hubungan trilateral menciptakan perdamaian kawasan Semenanjung Korea terutama Isu Nuklir Korea Utara. Konfrensi ini merupakan lanjutan dari KTT pertama yang diadakan di Oakland, Selandia Baru pada September tahun 1999.¹⁹

4. Kepentingan AS dalam upaya memperbaiki hubungan bilateral jepang – Korea Selatan

Kepentingan Amerika Serikat dalam upaya memperbaiki hubungan bilateral Jepang dan Korea selatan merupakan Kepentingan politik dan Keamanan Nasional Amerika Serikat

4.1 kepentingan politik

4.1.1 Containment Policy

Containment policy menjadi justifikasi bagi AS untuk melancarkan geostrateginya ke wilayah Asia Timur

¹⁹ " KTT antara Korea Selatan, Amerika dan Jepang, 26, 27 Oktober" diakses di http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_Po_detail.htm?No=2279 pada tanggal 10 Juli 2014

sebagai upaya membandung penyebaran pengaruh komunisme Soviet. Perang ideologi yang terjadi pada perang dingin antara dua kekuatan besar dunia Amerika Serikat dan Uni Soviet menghasilkan sebuah kebijakan Containment policy oleh Amerika Serikat. Containment policy merupakan kebijakan Amerika Serikat untuk membatasi pengaruh komunis dari Uni Soviet. Meski saat Uni Soviet tidak lagi ada namun bekas dari kekuasaan Uni Soviet berupa Ideologi masih dipakai diberbagai negara. Cina dan Korea Utara merupakan negara yang tetap kokoh mempertahankan ideologi komunis yang kental. Dengan ideologi non demokratisnya, akan dipastikan Cina dan Korea Utara memiliki sifat ekspansif layaknya Soviet.²⁰ Atas dasar itu pada tahun 2010 melihat pergerakan Cina yang kian meningkat dari segi ekonomi setelah mencoba melonggarkan nilai-nilai komunis dan menerima sistem kapitalis, Amerika Serikat merubah arah kebijakan luar negerinya dari Timur Tengah ke Asia Pasifik.

4.I.2. Mempertahankan Hegemoni

Menurut Jack C Plano Pertahanan diri (self preservation) merupakan satu dari lima dasar kepentingan nasional sebuah negara. Pertahanan diri ini diartikan sebagai kepentingan nasional yang tujuannya untuk mempertahankan diri agar negara yang memiliki power besar tidak melakukan atau merebut hegemoni kekuasaan yang nantinya dapat menimbulkan perpecahan. Namun seiring berjalan waktu self preservation ini juga digunakan oleh negara besar sebagai cara untuk mempertahankan hegemoninya dari ancaman negara-negara lain. Paska Perang Dingin menjadikan Amerika Serikat (AS) sebagai satu satunya *super power* di dunia

²⁰Djafar, Zainuddin,. *Indonesia, ASEAN & Dinamika Asia Timur*. Jakarta: Pustaka Jaya.2009.hal. 137

ini. Tentu dengan kehadiran China dan Korea Utara sebagai negara kuat dibidang militer dikawasan asia pasifik terkhusus dikawasan Asia Timur akan mempengaruhi stabilitas regional, serta dapat menghambat pergerakan Amerika serikat sendiri dan juga memperlemah posisi hegemoni Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Jelas hal ini menjadi sebuah ancaman serius bagi Amerika Serikat terlebih China dan Korea Utara memiliki perbedaan ideologi dengan Amerika serikat. *Containment Policy* masih sangat dipegang kuat amerika dalam arah kebijakan luar negrinya,

2 Kepentingan Keamanan

Keamanan Nasional adalah bagian dari kepentingan nasional yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan tujuan politik luar negeri untuk mempertahankan kepentingan nasional berkaitan dengan upaya mempertahankan keamanan nasional. Makna keamanan (*security*) bukan sekedar kondisi aman tenteram tetapi keselamatan atau kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jelasnya national security atau keamanan nasional menurut buku *International Relations: A Political Dictionary*, bermakna: “*The allocation of resources for the production, deployment, and employment of what we may call the coercive facilities which a nation uses in pursuing its interst*” dapat diterjemahkan sebagai “pengalokasian sumber-sumber untuk produksi, implementasi, dan pelaksanaan atas apa yang disebut sebagai fasilitas koersif yang digunakan suatu negara dalam mencapai kepentingan-kepentingannya.”²¹

IV.2.1 Kerjasama Trilateral

Amerika Serikat memiliki kepentingan dengan Jepang dan Korea

²¹Jack, C. Plano dan Roy Olton, *International Relations: A Political Dictionary*, Western Michigan University, california, 1999. Hal. 127

Selatan guna menciptakan keamanan kawasan Asia Timur. Kerjasama militer AS dengan negara-negara di sub-kawasan Asia Timur telah terjalin sejak lama, dalam hal ini Jepang, Korea Selatan, serta Taiwan. Kerjasama keamanan antara AS dengan Jepang telah dimulai sejak tahun 1960 dengan landasan *Treaty of Mutual Cooperation and Security*. Sejak kekalahannya dalam Perang Pasifik, Jepang merupakan pondasi keamanan penting bagi AS di sub-kawasan Asia Timur. Pada April 2012 pemerintah Jepang menyatakan persetujuan atas kebijakan relokasi 9.000 personil angkatan laut AS dimana sekitar 4.700 personil angkatan laut akan ditempatkan di basis militer Guam, 1.800 personil militer di Hawaii, dan 2.500 personil yang sifatnya rotasional akan ditempatkan di Australia. Kebijakan relokasi ini sejalan dengan keinginan kedua negara dalam upaya meningkatkan kehadiran militer AS di kawasan Asia Pasifik yang “*more geographically distributed, operationally resilient, and politically sustainable*”.²²

Kerjasama keamanan antara AS dengan Korea Selatan (*Republic of Korea/ ROK*) telah terjalin sejak 1953 dibawah *Mutual Security Agreement* yang mana sebanyak 28.500 personil militer AS ditempatkan di basis militernya di Korea Selatan. Sejak Juni 2009, terjadi perkembangan signifikan dalam kerangka kerjasama keamanan AS-Korea Selatan dengan diumukannya *Joint Vision for the Alliance* oleh Presiden Obama dan Lee yang menegaskan aliansi keamanan antara AS dan Korea Selatan. Pada pertengahan tahun 2010, AS mengirimkan kapal induk dan

pesawat F-22 serta mengadakan latihan gabungan militer dalam skala besar dengan militer Korea Selatan untuk menunjukkan komitmen kuat AS terhadap keamanan Korea Selatan dan Asia Pasifik. Pemerintah AS dan Korea Selatan mengeluarkan *Strategic Alliance 2015* pada September 2010 yang semakin menguatkan kerjasama keamanan AS-Korea Selatan. Dalam dokumen tersebut dijelaskan mengenai *Operational Control (OPCON) Agreement* serta konsekuensi bahwa AS akan mengirimkan sekitar 28.000 pasukan militernya ke Korea Selatan jika terjadi perang antara Korea Selatan dengan Korea Utara.

Melalui basis pertahanan di Jepang dan Korea Selatan Amerika berharap dapat mecitakan stabilitas regional Kawasan Asia Timur. Tentunya dengan hubungan yang baik antara Jepang dan Korea Selatan ketiga negara dapat lebih kokoh dalam mengangani isu keamanan yang terjadi dikawasan Asia Timur. Dan Secara tidak langsung Amerika Serikat telah mempertahankan dirinya dan membangun kekuatan untuk dirinya dikawasan Asia Timur.

Atas dasar itu melihat Amerika Serikat memperkuat posisinya dikawasan Asia Timur dengan membentuk aliansi. Jack C. Plano dan Roy Olton dalam bukunya *Kamus Hubungan Internasional* menjabarkan pengertian aliansi, yaitu: Aliansi merupakan perjanjian untuk saling mendukung secara militer jika salah satu negara penandatanganan perjanjian diserang oleh negara lain, selain itu aliansi ditujukan untuk memajukan kepentingan bersama di antara negara anggota. Aliansi dapat bersifat bilateral maupun multilateral, rahasia atau terbuka, sederhana atau sangat terorganisasi, dapat berjangka lama atau pendek, serta dapat dikendalikan untuk mencegah atau memenangkan sebuah perang. Sistem Keseimbangan Kekuatan cenderung mendorongnya pakta militer untuk mengimbangi perubahan dalam

²² *The Reassertion of the United States in the Asia-Pacific Region* dalam situs http://www.carlisle.army.mil/USAWC/parameters/Articles/2012spring/Struye_de_Swielande.pdf diakses pada 15 juli 2014

keseimbangan kekuatan. Piagam PBB mengakui hak untuk membela diri secara kolektif yang tercantum dalam pasal 5.

Kesimpulan

Jepang dan Korea Selatan merupakan dua negara yang terletak di kawasan Asia timur. Kedua negara ini memiliki keterkaitan sejarah yang sangat erat dimana Jepang pernah melakukan penjajahan di tanah Korea. Dimana dalam perkembangannya Korea kemudian terpecah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara dengan ideologi komunis yang secara historis diadopsi dari Uni Soviet membentuk negara sosialis, sementara itu Korea Selatan menjelma menjadi negara dengan bentuk Republik dengan faham demokrasi Amerika Serikat. Memiliki hubungan yang tidak baik dimasa lalu sebagai negara penjajah dan dijajah membuat Jepang dan Korea Selatan memiliki hubungan yang tidak baik. Kedua negara memiliki ego masing-masing untuk tidak ingin menciptakan hubungan erat.

Melihat ketegangan yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan, Amerika Serikat sebagai negara sekutu dari Jepang dan Korea Selatan merasa bahwa kedua negara harus memperbaiki hubungannya. Karena hal itu mempengaruhi efektifitas kerjasama trilateral yang mereka bangun. Efektivitas kerjasama terganggu dikarenakan enggannya Jepang dan Korea Selatan terlibat kontak bilateral sehingga proses trilateral tidak berjalan lancar. Ditambah lagi dengan adanya ancaman yang telah ditimbulkan oleh Korea Utara melalui pengembangan nuklir untuk perseniataanya dan juga China dengan peningkatan kapabilitas militernya sehingga membuat Amerika Serikat semakin giat berupaya memperbaiki hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan. Beberapa upaya dilakukan

oleh Amerika Serikat guna memperbaiki hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan. diantaranya mencoba mengirimpakan perwakilan Amerika Serikat guna menyerukan kepa Jepang dan Korea Selatan bahwa hubungan baik kedua negara sangat diperlukan untuk menciptakan kerjasama yang berdampak baik pula bagi ketiga negara (*trilateral*). Tidak hanya sampai disana Amerika Serikat mengupayakan peran sebagai mediator bagi kedua negara untuk menyudahi ketegangan yang sudah berlarut-larut.

Kerjasama yang sejatinya berfokus pada stabilitas keamanan kawasan dan denuklirisasi semenanjung Korea dijadikan pula ajang bagi Amerika Serikat untuk mendamaikan dua negara basis pertahanannya di Asia Timur itu. Hingga pada puncaknya Amerika Serikat melalui Presiden Barrack Obama dapat mempertemukan untuk pertama kalinya pemimpin kedua negara yaitu perdana menteri Jepang Shinzo Abe dan presiden Korea Selatan Park Geun-hye setelah menjabat sebagai pemimpin negara selama setahun lebih. Dalam pertemuan itu Jepang dan Korea Selatan berkomitmen untuk mengenyampingkan urusan pribadi serta sentimen sejarah kedua negara dan mulai fokus kepada kerjasama trilateral yang dibangun bersama Amerika Serikat.

Dari rangkaian upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk memperbaiki hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan terdapat sekelumit kepentingan yang mendasarinya. Kepentingan politik dan kepentingan keamanan. Sesuai dengan Teori Kepentingan nasional dari Jack C. Plano dan Roy Olton yang digunakan oleh penulis Kepentingan Politik Amerika Serikat berupa kepentingan mempertahankan diri (*self preservation*) sebagai negara yang memiliki hegemoni tunggal di dunia dan lebih spesifik berupa kepentingan perluasan pengaruh atau *Sphere of influence*. kepentingan politik ini

dimulai dari berakhirnya perang dingin dan lebih ditingkatkan pada kawasan Asia Timur karena melihat Korea Utara dan China sebagai negara dengan ideologi yang berbeda dengan Amerika Serikat dan tentunya dipandang sebagai ancaman bagi Amerika Serikat terlebih China merupakan negara yang kini lahir dengan perekonomian yang luar biasa meningkat dari tahun ke tahun hingga kini china menempati posisi kedua setelah Amerika Serikat sebagai negara dengan ekonomi terbesar.

Selanjutnya disini juga terdapat kepentingan Integritas Teritorial yang mana ada perswaingan antara Amerika Serikat dan China dalam menguasai dan menyebar luaskan pengaruh di Jalur transportasi SLOC's (sea lines of communications) Asia Timur. Kepentingan keamanan merupakan juga terdapat dalam pembahasan ini. Dimana kerjasama trilateral yang dibangun oleh Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan merupakan kerjasama keamanan dan militer guna menciptakan stabilitas regional ditengah-tengah perlombaan masing-masing negara untuk mengembangkan persenjataan.

Jepang dan Korea Selatan dipandang dapat menjadi basis pertahanan bagi Amerika Serikat untuk mengurangi pengaruh China dan denuklirisasi semenanjung Korea dikawasan Asia Pasifik umumnya dan Asia Timur khususnya.Sementara Kepentingan Keamanan Nasional Amerika Serikat dengan Adanya hubungan trilateral yang lancar antara Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan akan memudahkan tercapainya kepentingan politik dan keamanan Amerika Serikat.

Pada Intinya, Asia Timur merupakan kawasan yang cukup menghawatirkan dunia dikarenakan kuatnya rivalitas masing-masing negara dalam pengembangan militer .Amerika Serikat selaku negara pemegang hegemoni tunggal merasa terancam akibat adanya pengembangan kapabilitas sepihak

oleh Korea Utara dan China. Atas dasar itu Amerika Serikat mencoba membangun kerjasama yang lebih kuat guna memperlancar tercapai kepentingannya dalam hal Kepentingan Nasional Amerika Serikat dibidang Politik dan Keamanan. Hal itu dapat dilakukan ketika Jepang dan Korea Selatan lebih dapat bekerjasama dan mengesampingkan ketegangan kedua negara.

Daftar Pustaka

Buku

- Barber J. Steven, Dokdo – Takeshima Island : *A Brief Introduction to Korea's Dokdo [Takeshima] Island*. 2009.
- Djafar, Zainuddin., *Indonesia, ASEAN & Dinamika Asia Timur*. Jakarta: Pustaka Jaya.2009.
- Jack, C. Plano dan Roy Olton, *International Relations: A Political Dictionary*, Western Michigan University, California, 1999.
- Lee, Ran Key, 1998, "Korea's Territorial Rights to Tokdo History and International Law." *Korea Observer* XXIX-1
- LIPI, Komunika, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- McCartney, *Dilemmas of Third-Party Involvement in Peace Processes. Reflections for Practice and Policy from Colombia and the Philippines*, London, Conciliation Resources. 2006.
- Sita Planasari Aquadini, “ AS mendesak Seoul dan Tokyo mencari cara untuk mengubur luka dimasa lalu”, Koran Kompas, 13 Maret 2014,
- “Trilateral Naval Cooperation: Korea-US-Japan Workshop III,” jointly sponsored by The Korea Institute for Defense Analyses, The Center for Naval Analyses, and The Okazaki Institute, 1999,

Djafar, Zainuddin., *Indonesia, ASEAN & Dinamika Asia Timur*. Jakarta: Pustaka Jaya.2009.hal. 137

Jurnal

David Kang & Ji-Young Lee,*Japan-Korea Relations: More Squabbling*, Little Progress.E-Journal,2010

Khairunnisa, “*kebijakan militer amerika serikat di kawasan asia pasifik 2009-2012*” ejournal.hi.fisip-unmul.org,

Website

Nitin Philip, *The General Assembly : Dokdo/ Takeshima Islands Dispute (Japan – S. Korea)*,2013.

http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=14727&type=105#.UzZXTPumnFw diakses pada tgl. 2 Februari 2014

AS Desak Korsel, Cina dan Jepang Selesaikan Ketegangan diakses di http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=14593&type=105#.U8KdxqPoWcY pada tanggal 28 Maret 2014

Jeffrey Hays,*Tensions Over the Takeshima-Dokdo Islands*, 2013 dalam <http://factsanddetails.com/japan.php?itimid=2922&catid=22&subcatid=149#552> diakses hari Senin, 20 April 2014

“ Ianfu Indonesia “ diakses di <http://www.ianfuindonesia.webs.com/> pada tanggal 10 Juli 2014

¹ “isu jugun Ianfu hantui Jepang” diakses di <http://indo.wsj.com/posts/2013/06/05/i-su-jugun-ianfu-hantui-jepang/> pada tanggal 10 juli 2014

“ Survei: Hubungan Korsel dan Jepang Memburuk Akibat Ketegangan Politik” diakses di http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=15598&type=105#.U7rIS5SSz3Q pada tanggal 8 juli 2014

“Haru biru hubungan Korea Selatan-Jepang akibat peningkatan ketegangan politik” diakses di http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_In_detail.htm?No=32649 pada tanggal 8 Juli 2014.